

**MODEL PENGELOLAAN KEUANGAN DESA WISATA DI DESA  
PENGLIPURAN KABUPATEN BANGLI**



IDA AYU PUTRI WIDAWATI  
I WAYAN MERTHA  
NI LUH RISKA YUSMARISA  
I PUTU ESA WIDAHARTHANA  
I PUTU ARNAWA

**MANAJEMEN AKUNTANSI HOSPITALITI  
SEKOLAH TINGGI PARIWISATA NUSA DUA BALI**

**2018**

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

**MODEL PENGELOLAAN KEUANGAN DESA WISATA DI DESA PENGLIPURAN  
KABUPATEN BANGLI**



Ketua Tim Peneliti,

Dr. Ida Ayu Putri Widawati, S.E., M.Si.  
NIP 19590901 198903 2 001

Menyetujui,  
Ketua Program Studi  
Manajemen Akuntansi Hospitaliti

I Putu Arnawa, S.E., M.M.  
NIP 19611231 198303 1 001

Mengetahui,  
Kapuslitabmas

Dr. I Wayan Mertha, S.E., M.Si.  
NIP 19630101 198803 1 002

## DAFTAR ISI

	Halaman
COVER.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	8
2.1 Definisi Pengelolaan Keuangan Desa.....	8
2.2 Definisi Desa Wisata .....	11
2.3 Syarat untuk menjadi Desa Wisata.....	12
2.4 Teknik Pengelolaan Keuangan Desa Wisata .....	16
2.5 Laporan Keuangan .....	19
BAB III METODE PENELITIAN .....	22
3.1 Populasi dan Sampel.....	22
3.2 Metode dan Teknik Pengumpulan Data .....	22
BAB IV HASIL PENELITIAN .....	24
4.1 Deskripsi Lokasi.....	24
4.2 Kondisi Demografi .....	24
4.3 Komposisi Penduduk menurut Tingkat Pendidikan .....	25
4.4 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	27
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	33
5.1 Kesimpulan .....	33
5.2 Saran .....	33
DAFTAR PUSTAKA.....	35
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	36
Daftar Pertanyaan kepada Pemilik Homestay	
Daftar Pertanyaan kepada Pengelola Desa Wisata	
Jawaban Pemilik Homestay	
Jawaban Pengelola Desa Wisata	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Bali merupakan salah satu daerah tujuan wisata global, tempat wisatawan yang berkunjung dari seluruh dunia, sehingga sektor pariwisata merupakan sektor yang sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian Bali maupun Indonesia. Hal yang menjadikan Bali sebagai tujuan wisata bukan hanya karena keindahan alamnya, namun juga karena adat istiadat dan budaya yang dimiliki tiap-tiap daerah yang berbeda-beda. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) ke Provinsi Bali pada bulan Juli 2018 tercatat mencapai 624.366 kunjungan. Jumlah wisman ke Provinsi Bali pada bulan Juli 2018 naik sebesar 14,66 persen dibandingkan dengan catatan bulan Juni 2017.

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang sangat beragam, dimana perekonomian di Bali sangat tergantung pada industri pariwisata. Setiap kabupaten di Bali memiliki keindahan objek wisata yang sangat unik. Salah satu kabupaten dengan keindahan alam yang dipergunakan untuk menarik kunjungan wisatawan adalah Kabupaten Bangli. Kabupaten Bangli dibagi menjadi 4 (empat) Kecamatan, yaitu Kecamatan Bangli, Kecamatan Kintamani, Kecamatan Susut, dan Kecamatan Tembuku.

Kecamatan Bangli adalah kecamatan sekaligus menjadi ibukota Kabupaten Bangli. Kecamatan Bangli mempunyai luas wilayah sebesar 56,26 km<sup>2</sup>, dimana

menurut jenis penggunaan tanah yang paling dominan luasnya digunakan untuk lahan pertanian dan perkebunan. Hal ini menjadi faktor pendukung dalam hal pengembangan wisata terutama dalam mendukung desa wisata. Dengan dikembangkannya suatu daerah menjadi desa wisata, maka dapat memajukan perekonomian di daerah tersebut. Guna memajukan perekonomian suatu daerah sangat dipengaruhi oleh peran dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah itu sendiri.

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting guna memajukan perekonomian di daerah tersebut. Pemerintah daerah mempunyai tugas dan kewenangan untuk menilai daerah mana saja di wilayahnya yang bisa dikembangkan untuk memajukan perekonomian masyarakat. Tujuan utama pengembangan perekonomian suatu daerah adalah menghapus kemiskinan dan pengangguran. Salah satu cara untuk memajukan perekonomian di Bali, khususnya di Kabupaten Bangli adalah dengan pengembangan desa wisata mengingat di Kabupaten Bangli memiliki banyak objek wisata yang memiliki potensi. Beberapa objek wisata yang terdapat di Kabupaten Bangli antara lain Penelokan, Museum Geopark Batur, Kaldera gunung Batur, Air Terjun Tukad Cepung, Trunyan, Pura Kehen, Desa Adat Penglipuran, dan lain-lain.

Desa wisata berkembang untuk mengurangi kejenuhan wisatawan terhadap bentuk wisata modern dan ingin merasakan bagaimana kehidupan di alam pedesaan serta berinteraksi dengan masyarakat dan aktivitas sosial budayanya. Menurut Priasukmana & Mulyadin (2001), desa wisata merupakan suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian

pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, akomodasi, makanan-minuman, cinderamata, dan kebutuhan wisata lainnya.

Pemerintah Provinsi Bali mencanangkan dan menargetkan pembinaan 100 desa wisata yang telah dilakukan tahun 2013 dan selesai pada 2018. Pada tahun 2017 pembinaan Desa Wisata di Bali telah mencapai 53 desa wisata yang sudah dilakukan pembinaan dan pengembangan dan sisanya 47 Desa wisata di Bali masih dalam proses dan terus dilakukan pembinaan dan sosialisasi.

Diantara beberapa objek wisata tersebut, satu desa yang bisa dijadikan contoh pengembangan desa wisata adalah desa adat Penglipuran. Desa adat Penglipuran terletak di Desa Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Desa Penglipuran adalah salah satu desa wisata yg terletak di Kabupaten Bangli, tepatnya di Kelurahan Kubu di Kecamatan Bangli, Kabupaten Dati II Bangli. Desa Wisata Penglipuran memiliki daya tarik atas terbentuknya pola tatanan ruang desa, arsitektur tata ruang desa, arsitektur tradisional rumah penduduk, hutan bambu yang memiliki beragam jenis pohon bambu, adat istiadat masyarakat lokal, makanan dan minuman tradisional serta hasil kerajinan bambu khas desa tersebut. Penglipuran menjadi daya tarik wisatawan domestik dan mancanegara karena memiliki bentuk, tata ruang dan adat yang berbeda dari daerah di Bali pada umumnya. Penglipuran merupakan hasil dari konservasi yang dilakukan warga dan pemerintah guna bisa melindungi dan melestarikan budaya yang ada disana.

Salah satu contoh aturan yg dibuat untuk warganya adalah kendaraan bermotor tidak boleh dibawa ke wilayah desa tapi melalui jalur yg berbeda. Saat ini Desa Adat Penglipuran telah menjadi tujuan utama bagi para wisatawan. Dengan semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung maka diperlukan pengelolaan yang tepat, mulai dari budaya, pelestarian lingkungan. Yang tidak kalah penting adalah pengelolaan keuangan untuk menjamin perkembangan perekonomian desa yang berkesinambungan. Hal ini dikarenakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai dengan rencana diperlukan manajemen keuangan daerah yang transparan dan bertanggung jawab.

Pengembangan dan keberlanjutan desa wisata harus didukung oleh pengelolaan yang baik, termasuk pengelolaan keuangannya. Pengelolaan keuangan menjadi penting karena akan menjadi pedoman untuk perkembangan desa wisata. Sumber dana untuk pengembangan desa wisata dapat berasal dari berbagai pihak seperti bantuan pemerintah (pusat/provinsi/kabupaten/kota), pihak ketiga (bantuan luar negeri, dana *Corporate Social Responsibility* - CSR perusahaan) dan dari masyarakat sekitar. Dana tersebut dalam penggunaannya penting menerapkan model pengelolaan keuangan yang baik, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan. Manajemen keuangan merupakan bidang manajemen yang menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dalam suatu organisasi perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan nilai melalui pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya yang tepat. Manajemen keuangan merupakan manajemen fungsi keuangan yang terdiri atas keputusan investasi, pendanaan, dan keputusan pengelolaan asset (Sudana, 2011).

Apabila keuangan desa wisata tidak dikelola dengan baik, dikhawatirkan pada akhirnya membuat desa wisata tidak mampu bersaing dan menjaga eksistensinya dalam mendukung bisnis industri pariwisata. Tujuan manajemen keuangan bagi pengelola desa wisata adalah agar pengelola desa wisata menjadi sadar akan pentingnya pengelolaan keuangan, para pengurus/pengelola desa wisata mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan secara baik dan benar kepada pihak pemberi dana, dan masyarakat.

Aktivitas wisata seperti atraksi wisata, akomodasi, ketersediaan makanan-minuman, cinderamata, dan kebutuhan wisata lainnya akan membutuhkan partisipasi masyarakat sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, pelestarian budaya, dan keberlanjutan pemeliharaan lingkungan sejalan dengan jumlah wisatawan yang akan berkunjung (Chang, Hwung, & Chuang, 2012). Beberapa permasalahan lain yang timbul juga terkait dengan luputnya kolaborasi berbagai stakeholder dengan partisipasi masyarakat dan kurangnya peraturan pemerintah (Choi & Sirakaya, 2006).

Studi-studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa aktivitas pariwisata berdampak bagi meningkatnya kehidupan ekonomi masyarakat lokal, seperti peluang usaha, pendapatan, dan standar hidup dan kehidupan sosial, seperti budaya, kesejahteraan sosial, dan kualitas hidup (Choi & Sirakaya, 2006; Dyer, Gursoy, Sharma, & Carter, 2007; Tsundoda & Mendlinger, 2009). Masyarakat lokal merupakan penduduk asli yang bermukim di kawasan wisata dan menjadi salah satu kunci dalam pengembangan wisata (Damanik & Weber, 2006). Wearing (2001 dalam Dewi, 2013) mengungkapkan mengenai peran masing-



masing *stakeholder* (pemerintah, masyarakat, dan swasta) dalam upaya pengembangan wisata.

Dalam pengelolaan keuangan yang baik dan transparan maka tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat akan tercapai. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan sering kali terjadi penyalahgunaan. Maka untuk mencegah penyalahgunaan tersebut maka dibuat peraturan yang mengikat, seperti peraturan yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri yakni peraturan No. 113 pasal 2 tahun 2014 yang isinya “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipasi pasif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Hal senada juga dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Bangli dengan membuat Peraturan Bupati Bangli No. 58 tahun 2016 tentang pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa wisata terkait dengan bagaimana pengelola desa wisata dapat mengelola keuangan yang juga mengikuti asas-asas transparan, akuntabel, partisipasi pasif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Selama ini pengelola desa wisata belum memiliki model pengelolaan keuangan yang mencerminkan asas-asas tersebut.

Penelitian ini merupakan studi kasus pengelolaan keuangan di desa wisata penglipuran, mengingat desa wisata tersebut pernah menyandang sebagai desa wisata terbaik tingkat nasional. Dengan predikat tersebut tentunya desa wisata penglipuran telah terkelola dengan baik. Demikian pula mengenai pengelolaan keuangannya.

Dari paparan latar belakang masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk membuat model pengelolaan keuangan desa wisata di Bali dimana Desa Penglipuran, Kabupaten Bangli sebagai lokus pertama penelitian dengan harapan hasil penelitian ini bisa sebagai salah satu acuan dalam penyusunan model pengelolaan keuangan desa wisata.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Bagaimanakah model pengelolaan keuangan desa wisata di Desa Penglipuran Kabupaten Bangli?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Mengidentifikasi pengelolaan keuangan di desa wisata Penglipuran Kabupaten Bangli.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Definisi Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut Puji Agus, SST, Ak., M.Ak, CA (2015), Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa. Pengelolaan keuangan Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan; pelaporan; dan pertanggungjawaban.

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

Tahapan kegiatan:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa dilampiri:
  - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan;
  - b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
  - c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
7. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
8. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
9. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Definisi Keuangan Desa menurut Permendagri 113/2014 adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

## 2.2 Definisi Desa Wisata

Menurut Wiendu (1993), desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Desa wisata biasanya memiliki kecenderungan kawasan pedesaan yang memiliki kekhasan dan daya tarik sebagai tujuan wisata. Tipe Desa Wisata Menurut pola, proses, dan tipe pengelolanya desa atau kampung wisata terbagi dalam dua bentuk yaitu tipe terstruktur dan tipe terbuka (Wiendu,1993). Tipe terstruktur ditandai dengan karakter sebagai berikut:

- a. Lahan terbatas yang dilengkapi dengan infrastruktur yang spesifik untuk kawasan tersebut. Kelebihan tipe ini adalah dalam citra yang ditumbuhkan mampu menembus pasar internasional.
- b. Lokasi pada umumnya terpisah dari masyarakat lokal sehingga dampak negatif yang ditimbulkan diharapkan terkontrol dan pencemaran sosial budaya akan terdeteksi sejak dini.
- c. Lahan tidak terlalu besar dan masih dalam tingkat kemampuan perencanaan yang integratif dan terkoordinir sehingga diharapkan menjadi agen untuk mendapatkan dana internasional sebagai unsur utama menangkap jasa dari hotel-hotel berbintang.

## 1. Tipe Terbuka

Tipe ini ditandai dengan karakter tumbuh dan menyatunya kawasan dengan struktur kehidupan, baik ruang maupun pola masyarakat lokal. Distribusi pendapatan yang didapat dari wisatawan dapat langsung dinikmati oleh penduduk lokal, akan tetapi dampak negatifnya cepat menjalar menjadi satu ke dalam penduduk lokal sehingga sulit dikendalikan.

Mulyadin (2001), menyatakan desa wisata merupakan suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, akomodasi, makanan-minuman, cinderamata, dan kebutuhan wisata lainnya.

### **2.3 Syarat untuk Menjadi Desa Wisata**

Suatu kawasan dikatakan dapat menjadi desa wisata harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut (Syamsu dalam Prakoso, 2008):

- a. Faktor kelangkaan adalah sifat dari atraksi wisata yang tidak bias dijumpai atau langka di tempat lain.
- b. Faktor kealamiahannya adalah sifat atraksi wisata yang belum pernah mengalami perubahan akibat campur tangan manusia.

- c. Keunikan, yakni sifat atraksi wisata yang memiliki keunggulan komparatif dibanding objek wisata lain.
- d. Faktor pemberdayaan masyarakat yang mampu menghimbau agar masyarakat ikut serta dan diberdayakan dalam pengelolaan objek wisata di daerahnya.

Desa wisata dilihat sebagai bentuk industri pariwisata yang berupa kegiatan mengaktualisasikan perjalanan wisata identik meliputi sejumlah kegiatan yang bersifat menghimbau, merayu, mendorong wisatawan sebagai konsumen agar menggunakan produk dari desa wisata tersebut atau mengadakan perjalanan wisata ke desa wisata tersebut atau disebut pemasaran desa wisata. Komponen produk pariwisata itu sendiri terdiri atas angkutan wisata, atraksi wisata, dan akomodasi pariwisata (Soekadijo, 2000).

Menurut Suswantoro (2007) pada hakekatnya pengertian produk wisata adalah keseluruhan pelayanan yang diperoleh dan dirasakan atau dinikmati oleh wisatawan semenjak ia meninggalkan tempat tinggalnya sampai ke daerah tujuan wisata hingga kembali kerumah dimana ia berangkat semula. Sedangkan Bukart dan Medlik (dalam Yoeti, 1996:151) mendeskripsikan produk wisata sebagai susunan produk yang terpadu, yang terdiri dari obyek wisata, atraksi wisata, transportasi (jasa angkutan), akomodasi dan hiburan di mana tiap unsur dipersiapkan oleh masing-masing perusahaan dan ditawarkan secara terpisah.

Produk wisata yang ditawarkan dan beroperasi pada ekonomi pasar. Kondisi itu memungkinkan desa wisata tersebut ditinggalkan oleh wisatawan karena perubahan kondisi demand dan supply yang berkembang di pasar global. Dimana



setiap penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri (Jhingan, 1990). Tiap terjadi produksi produk akan ada pendapatan yang besar sama dengan nilai produksi sehingga dalam keseimbangan, peningkatan produksi akan selalu diiringi peningkatan pendapatan dan akhirnya diiringi juga oleh peningkatan permintaan. Kondisi ini mengharuskan desa wisata mampu memberikan diferensiasi produk yang beranekaragam dan tanggap terhadap perubahan kondisi pasar.

Produk wisata sebagai salah satu obyek penawaran dalam pemasaran pariwisata memiliki unsur-unsur utama yang terdiri 3 bagian (Oka A. Yoeti, 2002:211) :

- a. Daya tarik daerah tujuan wisata, termasuk didalamnya citra yang dibayangkan oleh wisatawan.
- b. Fasilitas yang dimiliki daerah tujuan wisata, meliputi akomodasi, usaha pengolahan makanan, parkir, transportasi, rekreasi dan lain-lain.
- c. Kemudahan untuk mencapai daerah tujuan wisata tersebut.

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator PTPKD yang mempunyai tugas:

1. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa
2. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APBD PTPKD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa

3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa
4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa
5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa

Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya yang mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
2. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa
3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan
4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa
6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

Azas-azas Pengelolaan Keuangan :

1. Transparansi (terbuka, tidak ada yang ditutupi)
2. Akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan, ADM, moral, hukum)
3. Partisipatif (mengutamakan keterlibatan masyarakat)
4. Tertib dan disiplin anggaran (konsisten, tepat waktu, tepat jumlah dan taat azas)

#### **2.4 Teknik Pengelolaan Keuangan Desa Wisata**

Keuangan desa wisata adalah semua hak dan kewajiban pengelola desa wisata dalam rangka penyelenggaraan desa wisata yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban pengelola desa wisata tersebut. Pengelolaan keuangan desa wisata adalah keseluruhan proses kegiatan, yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan desa wisata. Pengelolaan keuangan desa wisata dilakukan secara tertib dan terencana yang ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wisata. Keuangan desa wisata dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

### **Pengelolaan Keuangan Desa Wisata mencakup:**

1. Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa Wisata
2. Pengendalian Pembiayaan Desa Wisata
3. Penganggaran Desa Wisata

Menurut Nuryanti (1993) dan Hadiwijoyo (2012), komponen produk desa wisata terdiri dari atraksi, aksesibilitas, aktivitas, dan akomodasi. Komponen ini menjadi faktor penentu dalam pengembangan suatu desa wisata. Jenis produk yang ditawarkan berbentuk paket wisata dan paket wisata yang ditawarkan tidak harus sesuai pengelola, namun dibebaskan kepada wisatawan untuk memilih produk yang ingin dikunjungi.

- 1) Atraksi: Memiliki atraksi wisata berupa objek-objek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai objek wisata
- 2) Aksesibilitas: Memiliki aksesibilitas baik sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi atau terdapat transportasi yang menjangkau wilayah tersebut.
- 3) Perangkat desa (masyarakat): Masyarakat dan perangkat desa menerima dan memberikan dukungan tinggi terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang ke desanya.
- 4) Akomodasi: Memiliki sarana akomodasi, telekomunikasi, dan ketersediaan tenaga kerja yang memadai.

### **Pengendalian Pembiayaan atas Pengelolaan Desa Wisata:**

Biaya-biaya yang terjadi akibat pengelolaan desa wisata diambil dari besaran pendapatan yang diperoleh semua komponen yang terlibat dalam bisnis yang dikelola oleh masyarakat di kawasan desa wisata akan dikelola dengan sebaik-baiknya dengan membuat anggaran kemungkinan atas biaya-biaya yang diprioritaskan untuk meningkatkan potensi desa wisata.

### **Teknik Penganggaran Desa Wisata**

Perencanaan dan penganggaran desa wisata merupakan proses yang terintegrasi sehingga *output* dari perencanaan adalah penganggaran. Oleh karena pentingnya anggaran tersebut maka perencanaan anggaran/penyusunan anggaran juga menjadi sesuatu yang penting dalam penyelenggaraan desa wisata.

Dalam proses perencanaan anggaran dikenal adanya siklus anggaran yang meliputi tiga tahap sebagai berikut.

#### **1. Tahap Persiapan Anggaran**

Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat.

## 2. Tahap Pelaksanaan Anggaran

Setelah anggaran disetujui, tahap berikutnya adalah pelaksanaan anggaran. Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa adalah dimilikinya sistem informasi akuntansi dan pengendalian manajemen keuangan.

## 3. Tahap Pelaporan dan Evaluasi

Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap persiapan dan pelaksanaan anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas.

### **2.5 Laporan Keuangan**

Laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap, biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara, seperti sebagai laporan arus kas, atau laporan dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Laporan keuangan menjadi informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Selain sebagai informasi, laporan keuangan juga berfungsi sebagai pertanggungjawaban dan menggambarkan kesuksesan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Laporan keuangan bertujuan untuk

menggambarkan posisi keuangan perusahaan yang mencerminkan kinerja dari suatu perusahaan yang berguna bagi pemakai untuk mengambil keputusan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, tujuan penyajian laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Penyediaan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
- 2) Menunjukkan apa yang telah dilakukan pihak manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Pemakai laporan keuangan mempunyai kepentingan yang berbeda-beda sehingga sulit untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat memuaskan semua pihak. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, jenis-jenis laporan keuangan meliputi:

- 1) Daftar neraca, yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu.
- 2) Perhitungan laba rugi, yang menggambarkan jumlah penghasilan, biaya, dan laba rugi perusahaan pada suatu periode tertentu.
- 3) Laporan arus kas, yang menggambarkan keadaan kas perusahaan.
- 4) Laporan perubahan ekuitas, yang menggambarkan keadaan modal sendiri yang dimiliki perusahaan dalam suatu periode tertentu.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2007) menyatakan bahwa laba mencerminkan pos lainnya yang memenuhi

definisi penghasilan dan mungkin timbul atau tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan biasa. Definisi penghasilan juga mencakup laba yang belum direalisasi. Laba biasanya dicantumkan dalam jumlah bersih setelah dikurangi dengan beban yang bersangkutan. Pentingnya informasi laba disebutkan dalam *Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No.1*, bahwa selain untuk menilai kinerja manajemen, laba juga dapat membantu mengestimasi kemampuan laba yang representatif, serta untuk menaksir risiko dalam investasi atau kredit. Informasi laba, nilai buku saham dan laba per lembar saham merupakan informasi yang dibutuhkan oleh para investor di pasar modal.

FASB (*Financial Accounting Standards Board*) *statement* mendefinisikan *accounting income* atau laba akuntansi sebagai perubahan dalam equity (*net asset*) dari suatu entitas selama satu periode tertentu yang diakibatkan oleh transaksi dan kejadian atau peristiwa yang berasal bukan dari pemilik. Laba akuntansi dapat juga digunakan sebagai informasi bagi investor untuk memprediksi dividen yang akan diperoleh. Neraca merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan yang terdiri dari aktiva, kewajiban, dan modal. Neraca terdiri dari kekayaan dan sumber kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat desa wisata di Desa Penglipuran Kabupaten Bangli. Desa wisata di Desa Penglipuran Kabupaten Bangli terdiri dari 30 homestay dan 3 unit *guest house*. Unit analisis yang digunakan adalah model pengelolaan keuangan. Jumlah sampel berdasarkan perhitungan ukuran sampel sebesar 30 responden.

#### **3.2 Metode dan Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik analisis data menggunakan analisis kelebihan dan kekurangan model pengelolaan keuangan desa wisata. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Metode pengumpulan data primer terdiri dari teknik observasi lapangan, wawancara, dan kuesioner. Teknik pengumpulan data sekunder melalui pemanfaatan dokumentasi yang terkait dengan penelitian. Teknik wawancara yang digunakan, dimana peneliti menentukan terlebih dahulu informan (narasumber wawancara). Dalam penelitian ini, narasumber wawancara merupakan pihak yang memiliki keterkaitan dengan wilayah studi, yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli, dan pengelola desa wisata dan aparat desa. Hasil wawancara ini diolah dengan metode kualitatif berupa teknik analisis deskriptif eksploratif. Teknik observasi lapangan digunakan untuk melihat kondisi penglipuran dan

model pengelolaan keuangan desa wisata. Teknik pengambilan sampel untuk wawancara atau daftar pertanyaan berupa *purposive sampling* (pengambilan responden secara sengaja) dan *randomly sampling* (pengambilan responden secara acak). *Purposive sampling* ditujukan kepada masyarakat yang bermata pencaharian di bidang wisata, sedangkan *randomly sampling*, yaitu masyarakat Desa Penglipuran. Terakhir dilakukan *focus group discussion* yang melibatkan pihak pengelola, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli, dan aparat desa setempat dan pelaku wisata.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1. Deskripsi Lokasi**

Desa adat penglipuran merupakan salah satu destinasi wisata yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan atau eko wisata dan pengembangan pariwisatanya berbasis kerakyatan (*community based tourism*) . Keberadaan Desa adat ini ada di Kabupaten Bangli, dengan luas wilayah kurang lebih 115 ha, dimana hanya 20 are dimiliki oleh pemerintah dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: Desa Adat Kubu di sebelah timur, di sebelah selatan Desa Adat Gunaksa, dan di sebelah barat Tukad Sang-sang, sedangkan di sebelah utara Desa Adat Kayang. Desa Adat Penglipuran berada pada ketinggian 700 meter diatas permukaan air laut, terletak pada jalur wisata Kintamani, sejauh 5 KM dari pusat Kota Bangli, dan 45 KM dari pusat Kota Denpasar.

#### **4.2. Kondisi Demografi**

Desa wisata penglipuran masih teguh memegang adat dan tradisi secara turun temurun, ini dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari yang masih tradisional baik dari segi struktur bangunan rumah maupun tata cara kehidupan masyarakatnya

##### **1. Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk Desa wisata penglipuran kira-kira 1015 jiwa sampai dengan tahun 2018, terbagi dalam 240 KK jadi rata-rata 1 KK terdiri 4-5 orang.

Desa wisata Penglipuran dipimpin oleh seorang Lurah sekaligus memiliki 1 dusun.

### **4.3. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

Tingkat pendidikan penduduk sangat berpengaruh terhadap pola pikir, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat guna mendukung perkembangan dan kemajuan suatu daerah. Pendidikan sangat penting bagi masyarakat baik pendidikan formal maupun nonformal karena keduanya sama-sama penting sebagai modal dalam membangun dan mengembangkan diri setiap anggota masyarakat di segala bidang.

#### **Sarana dan Prasarana**

##### **1. Sarana Pemerintahan Desa**

Sarana dan prasarana yang terdapat di Desa wisata penglipuran adalah terdapat 1 buah Kantor Kelurahan dan 3 buah Balai pertemuan yang berada di lingkungan Desa. Halaman kantor kelurahan cukup luas bisa dijadikan area parkir dan tempat kegiatan-kegiatan penting kelurahan, juga terdapat tanah kas desa seluas hanya 20 are, tanah dominan merupakan tanah adat

##### **2. Sarana Perekonomian**

Sarana dan prasarana perekonomian di Desa wisata penglipuran merupakan faktor penting dalam menunjang bagi kelangsungan kegiatan produksi, baik kegiatan produksi hasil pertanian maupun kegiatan produksi lainnya. Di Desa penglipuran berkembang pembangunan homestay dengan ciri khas bangunan berarsitektur tradisional. Sedangkan industri rumah tangga yang berkembang

yakni pembuatan cinderamata berbahan dasar bambu dan keranjang bambu, juga pembuatan loloh cemcem (jamu dari daun cemcem)

### 3. Sarana Sosial Budaya

#### a. Sarana Pendidikan

Jumlah tempat pendidikan yang ada dalam suatu daerah dapat dijadikan tolak ukur kemajuan suatu daerah, sehingga program pemerintah wajib belajar dapat dilakukan oleh setiap warga negara. Dari sarana pendidikan di Desa wisata penglipuran terbilang cukup walaupun belum ada PAUD tapi sudah ada Taman kanak-kanak (TK), SD, SMP, SMA sampai dengan Perguruan Tinggi (STAH= Sekolah Tinggi Agama Hindu).

#### b. Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan di Desa Wisata Penglipuran untuk umat Hindu terdapat Pura yakni Tri Kahyangan Tiga yakni Pura Desa, Pura Puseh, dan Pura Dalem yang masih berada dalam kondisi baik selain tempat suci di setiap pekarangan rumah.

#### c. Sarana Kesehatan

Pelayanan kesehatan masyarakat dilayani di Desa Penglipuran dilakukan di Puskesmas Pembantu dan posyandu dilakukan di Balai Banjar atau Balai Pertemuan yang dimiliki sebanyak 4 Balai pertemuan.

#### d. Sarana Perhubungan

Prasarana perhubungan adalah berupa jalan raya merupakan akses yang sangat vital bagi kelancaran aktivitas dan mobilitas masyarakat. Kemajuan sarana perhubungan yang menghubungkan Desa Wisata Penglipuran dengan daerah

sekitarnya, menjadikan Desa Penglipuran mengalami kemajuan dan keterbukaan akan berbagai bidang kehidupan baik sosial maupun ekonomi. Hampir seluruh jalan di Desa Wisata Penglipuran sudah beraspal, demikian akses masuk ke Desa wisata penglipuran jalan sudah memadai sehingga bus wisatawan yang akan masuk telah bisa parker dengan leluasa, di desa penglipuran dilengkapi dengan 4 sarana parkir.

#### **4.4. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

##### **1. Pengembangan Potensi Wisata di Desa Penglipuran**

Potensi wisata penglipuran yang berbasis lingkungan (eko wisata) dengan aspek social budaya yang dilestarikan secara turun temurun selama ini sudah dimanfaatkan secara optimal baik oleh masyarakat maupun pengelola, oleh masyarakat setempat desa wisata ini telah memanfaatkan potensi daerahnya untuk dapat menjadi daya tarik wisata.

##### **2. Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat di Desa Wisata dalam pengembangan potensi-potensi wisata diwujudkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil dari pengembangan potensi wisata. Partisipasi dalam pengembangan potensi-potensi wisata di Desa Wisata Penglipuran tersebut merupakan kegiatan kemasyarakatan Desa Penglipuran untuk mencapai tujuan bersama, yaitu mewujudkan sebuah daerah tujuan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*) dengan tidak mengesampingkan pelestarian lingkungan, peningkatan pendapatan dan taraf hidup masyarakat sekitarnya.

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan potensi-potensi wisata di Desa Wisata Penglipuran adalah sebagai berikut :

a. Partisipasi masyarakat di Penglipuran dalam perencanaan pengembangan potensi wisata diwujudkan dengan memberikan ide, gagasan dan pendapat yang dilandasi oleh keyakinan bahwa daerahnya memiliki keindahan alam di pedesaan dan budaya yang perlu dilestarikan serta potensi lainnya yang perlu dikembangkan menjadi obyek wisata pedesaan yang pada akhirnya akan menambah kesejahteraan masyarakat. Setiap perencanaan diawali dengan melakukan rapat segala sesuatu di musyawarahkan untuk mencapai mufakat. Keputusan rapat diajukan ke kelurahan untuk mendapat persetujuan, sebelum dilaksanakan.

b. Partisipasi masyarakat di Desa Penglipuran dalam pelaksanaan pengembangan potensi wisata sebagai ukurannya masyarakat secara nyata terlibat dalam aktivitas-aktivitas nyata yang merupakan realisasi program-program atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan potensi wisata. Masyarakat Desa Penglipuran secara aktif dan sukarela berpartisipasi dalam pelaksanaan pengembangan potensi wisata yang diwujudkan dengan mengikuti diskusi-diskusi, rapat-rapat dan pelatihan-pelatihan termasuk partisipasi memberikan sumbang saran, pemikiran waktu dan tenaga untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan potensi desa wisata di Desa Penglipuran.

### **3. Pembangunan Sarana dan Prasarana**

Masyarakat Desa penglipuran telah sadar akan adanya pengembangan potensi wisata di daerah mereka dan untuk memberikan suatu pelayanan kepada

wisatawan yang berkunjung untuk menikmati keindahan alam pedesaan, wisata sejarah dan religi, wisata alam dan lingkungan dan budaya telah dibangun berbagai sarana fisik diantaranya *homestay*, warung makan. Sedangkan prasarana yang telah dibangun antara lain jalan dan papan nama masuk lokasi desa wisata.

#### **4. Model Pengelolaan Keuangan Desa Wisata Penglipuran**

Berdasarkan hasil wawancara yang mendalam dilakukan terhadap pengelola desa wisata penglipuran maka dapat dijelaskan pengelolaan keuangan desa wisata yang telah diterapkan. Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh desa wisata dari aktivitasnya, bersumber dari penjualan produk atau jasa kepada pelanggan. Desa wisata terdiri dari beberapa *homestay* dan pendapatan masing masing *homestay* akan didistribusikan kepada pemilik *homestay*, pengelola, dan desa wisata. Pemilik *homestay* adalah pihak yang memiliki *homestay* sedangkan pengelola adalah pihak yang ditunjuk desa untuk mengelola beberapa *homestay*. Pendapatan yang diperoleh karena adanya kerjasama pihak pemilik dan pengelola sehingga diperlukan adanya pembagian keuntungan yang diperoleh.

Terdapat kesepakatan persentase pendapatan yang diberikan kepada masing-masing pihak. Persentase pendapatan ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini telah banyak dikembangkan usaha selain penyewaan kamar untuk mendukung pendapatan desa wisata. Misalnya dengan penjualan souvenir, penjualan buah-buahan, penjualan kain khas penglipuran, ukir-ukiran dan lain-lain.



Pengelolaan keuangan dilakukan oleh pengurus atau pengelola desa wisata di desa penglipuran. Pendapatan masing-masing homestay diberikan kepada pemilik sebesar 80% sedangkan 20% diberikan kepada desa. Seluruh pendapatan yang diperoleh oleh desa wisata disetor 100% kepada pemerintah daerah kabupaten dan selanjutnya sebesar 40% dikembalikan ke desa. Selanjutnya berdasarkan 40% tersebut, 20% diserahkan kepada desa adat dan 20% diserahkan kepada pihak pengelola atau pengurus untuk keperluan manajemen desa wisata. Pendapatan ini diperoleh dari penjualan homestay. Pihak pengelola selalu berusaha meningkatkan penjualan demikian juga dengan pemilik homestay. Mereka bekerjasama untuk memenuhi permintaan kamar homestay. Apabila kamar suatu homestay telah disewakan, maka akan diberikan kamar homestay lainnya. Pengelolaan keuangan akan diatur oleh pihak pengelola desa wisata.

Pengelolaan keuangan desa wisata sudah memiliki struktur organisasi pengelola, termasuk juga sudah memiliki bagian pemasaran. Struktur organisasi sangat penting sebagai dasar pengelolaan keuangan. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian tugas dan tanggungjawab sehingga memudahkan untuk memberikan imbalan jasa sesuai dengan tugas masing-masing. Hal ini berdampak terhadap pengelolaan keuangan agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberian imbalan jasa. Struktur organisasi juga menunjang dalam pengendalian internal untuk menjaga kekayaan desa wisata yang dikelola.

Salah satu bagian yang terdapat dalam struktur organisasi adalah bagian pemasaran. Bagian pemasaran bekerjasama dengan *online travel agent* untuk memudahkan pemasaran dan promosi serta memudahkan dalam transaksi

keuangan. Pembayaran oleh pihak travel terdiri dari dua jenis yaitu secara tunai maupun secara kredit. Penjualan secara kredit dapat menimbulkan piutang, hal ini sudah dikontrol dan ditangani dengan baik, sehingga piutang dapat tertagih tepat waktu. Pengelola desa wisata juga telah menggunakan sistem pengelolaan keuangan yang terkomputerisasi walaupun menurut pengelola masih sederhana. Hal ini bertujuan agar semua kegiatan dapat dikontrol dengan baik. Menurut keterangan pihak pengelola homestay, dengan sistem terkomputerisasi, data-data dapat lebih aman karena tersimpan secara *softcopy* maupun *hardcopy*. Pengendalian internal pihak pengelola sudah baik karena memiliki struktur organisasi, formulir, sistem terkomputerisasi, karyawan sesuai keahliannya, dan pengawasan selalu dilakukan pihak pengelola.

Pihak pengelola menyusun anggaran dengan tujuan agar dapat melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Festival secara rutin dilaksanakan dan tentunya hal ini memerlukan anggaran yang tinggi. Festival ini bertujuan untuk promosi atau memperkenalkan desa wisata serta mempertahankan keberadaan dalam bidang pariwisata. Festival ini biasanya memerlukan dana sebesar Rp 400.000.000,00 yang bersumber dari dana desa. Pemilik homestay memiliki 1 sampai dengan 2 kamar sehingga belum melakukan pembayaran pajak. Pihak pemilik homestay adalah wajib pajak sedangkan pengelola desa wisata hanya sebagai manajemen seluruh homestay. Desa wisata memiliki reputasi atau *brand* sehingga banyak sponsor yang datang bekerjasama dengan desa wisata. Pihak pengelola tidak memperoleh gaji bulanan namun memperoleh imbalan jasa berdasarkan kegiatan yang dilakukan. Karyawan

diberikan gaji bulanan, jaminan kesehatan, serta uang harian. Karyawan pada desa wisata penglipuran berjumlah 23 orang. Setiap kegiatan dalam desa wisata dilaksanakan dengan sistem kerjasama antara pengelola dengan pemilik homestay. Setiap tahun desa wisata memiliki anggaran yang akan digunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Setiap pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan akan diberikan imbalan jasa sesuai bidangnya masing-masing. Imbalan jasa yang diberikan kepada pelaksana kegiatan seperti pembuatan penjor, pengurus akomodasi, pengatur lesehan dan lain-lain.

Model pengelolaan keuangan desa wisata penglipuran disusun berdasarkan peraturan, masyarakat, uji coba, dan penetapan. Model pengelolaan keuangan desa wisata disusun berdasarkan aturan namun disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Laporan keuangan yang disusun biasanya terdiri dari laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan modal, laporan arus kas dan catatan keuangan. Pengelola desa wisata hanya menyusun laporan keuangan utama yaitu laporan laba dan neraca yang tentunya disesuaikan lagi dengan kebutuhan desa wisata dan masyarakat. Laporan keuangan yang dihasilkan menunjukkan kinerja dan posisi keuangan desa wisata. Kinerja tercantum dalam laporan laba rugi dan posisi keuangan tercantum dalam neraca. Namun dalam desa wisata disajikan dalam suatu laporan yang didalamnya memuat kedua hal tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keuntungan yang diperoleh disampaikan kepada desa wisata setiap tahun dalam suatu rapat desa wisata.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1. Kesimpulan**

Model pengelolaan keuangan desa wisata di Desa Penglipuran Kabupaten Bangli ditetapkan berdasarkan peraturan, kebutuhan masyarakat, uji coba, dan penetapan oleh desa wisata. Model pengelolaan keuangan desa wisata dilaksanakan atas dasar kerjasama pemilik homestay dan pengelola desa wisata yang bertindak sebagai pihak manajemen. Sistem akuntansi yang digunakan oleh pengelola keuangan desa wisata sudah terkomputerisasi walaupun menurut pihak pengelola masih sederhana. Anggaran disusun sebagai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Laporan keuangan yang dihasilkan pengelola desa wisata menunjukkan kinerja maupun posisi keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

#### **2. Saran**

- a. Penelitian agar dilakukan lebih dari 1 desa wisata sehingga dapat diperoleh perbandingan model pengelolaan keuangan desa wisata.
- b. Model desa wisata penglipuran agar dapat diterapkan pada desa wisata lainnya
- c. Pemerintah hendaknya memberikan bantuan penyuluhan-penyuluhan dan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan pariwisata dan pemberdayaan masyarakat serta mengoptimalkan pembinaan sadar wisata kepada masyarakat.
- d. Pemerintah hendaknya memberikan fasilitas promosi secara berkelanjutan.

- e. Program pemberian bantuan modal untuk pengembangan sarana dan prasarana pariwisata kepada masyarakat agar lebih dioptimalkan dari pemerintah.

## Daftar Pustaka

- Chang, K. C., Hwung, H. H., & Chuang, C. T. (2012). An exploration of stakeholder conflict over the Taiwanese Marine Protected Area. *Ocean and Coastal Management*, 55, 36-41. doi:10.1016/j.ocecoaman.2011.10.008.
- Choi, H. C., & Sirakaya, E. (2006). Sustainability indicators for managing community tourism. *Tourism Management*, 27(6), 1274–1289. doi:10.1016/j.tourman.2005.05.018.
- Dyer, P., Gursoy, D., Sharma, B., & Carter, J. (2007). Structural modeling of resident perceptions of tourism and associated development on the Sunshine Coast, Australia. *Tourism Management*, 28, 409–422. doi:10.1016/j.tourman.2006.04.002.
- Damanik, J., & Weber, H. F. (2006). *Perencanaan ekowisata: Dari teori ke aplikasi*. Yogyakarta: Andi.
- Dewi, M. H. U., Fandeli, C., & Baiquni, M. (2013). Pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Kawistara*, 3(2), 117-226.
- Hadiwijoyo, S. S. (2012). *Perencanaan pariwisata perdesaan berbasis masyarakat: Sebuah pendekatan konsep*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Nuryanti, W. (1993). *Concept, perspective, and challenges*. Konferensi Internasional mengenai Pariwisata Budaya. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Tsundoda, T., & Mendlinger, S. (2009). Economic and social impact of tourism on a small town: Peterborough New Hampshire. *J. Service Science & Management*, 2, 61-70.

## LAMPIRAN

### DAFTAR PERTANYAAN KEPADA PEMILIK HOMESTAY

No	PERTANYAAN
1	Berapa jumlah kamar yang Bapak/Ibu sewakan?
2	Fasilitas apa saja yang tersedia?
3	Bagaimana pembagian pemesanan kamar?
4	Apakah manfaatnya bila penyewaan homestay melalui pengelola?
5	Bagi masyarakat yang tidak memiliki kamar apakah memperoleh manfaat?
6	Bagaimana dengan pembagian pendapatan?
7	Siapakah yang menanggung biaya pemeliharaan homestay?
8	Apakah puas terhadap kinerja pengelola?
9	Apakah sarapan sudah termasuk harga kamar?
10	Apakah pemilik atau pengelola yang menyiapkan sarapan?

## DAFTAR PERTANYAAN KEPADA PENGELOLA DESA WISATA

NO	PERTANYAAN
1	Berapa penduduk desa penglipuran?
2	Terdiri dari berapa kepala keluarga?
3	Bagaimana susunan organisasi pengelola homestay?
4	Bagaimana komposisi penduduk dari segi pendidikan?
5	Bagaimana sarana dan prasarana pemerintah desa, perekonomian, dan sosial budaya?
6	Berapa jumlah homestay?
7	Apakah terdapat masyarakat yang tidak mengelola homestay?
8	Bagaimana model pengelolaan keuangan? apakah terdapat anggaran?
9	Apakah disusun laporan laba rugi dan neraca untuk pelaporan dan pertanggungjawaban?
10	Apakah melaporkan pajak?
11	Berapa kamar yang dimiliki masing-masing homestay?
12	Apakah terdapat pengurus dan pengawas?
13	Apakah bekerjasama dengan <i>travel agent</i> ?
14	Apakah terdapat keuntungan yang dibagikan kepada pihak desa?